

Pendampingan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai Dasar dalam Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah

The Assistance of the Preparation of Strategic Environmental Assessment as A Foundation for Sustainable Development in the Province of Central Kalimantan

Nina Yulianti ^{1*}

Fengky Florante Adji ¹

Alexandra Hukom ²

Nomeritae ³

Hendrik Segah ^{4,5}

Muhammad Taswin Munier ⁵

Paulus Tembalang ⁵

Ravenalla Al Hakim Sampurna Putra ⁶

¹Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

²Department of Magister Economic, Faculty of Economic and Business, University of Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

³Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

⁴Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

⁵Global Green Growth Institute, Jakarta, Indonesia

⁶Department of Medical Doctor, faculty of Medicine, University of Palangka Raya Jakarta, Indonesia

email: nyulianti@agr.upr.ac.id

Kata Kunci

Pendampingan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Keywords:

Assistance
Strategic Environmental Assessment
Sustainable Development Goals

Received: May 2024

Accepted: July 2024

Published: September 2024

Abstrak

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) merupakan tujuan bersama (common goals) yang disepakati dan harus dicapai oleh semua bangsa pada tahun 2030. Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan dari tingkat nasional sampai di tingkat daerah. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah sedang mempersiapkan berbagai dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kelompok kerja dan tenaga ahli tentang prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis terutama pasca pemilihan umum bersama Tahun 2024. Metode yang dilakukan untuk mengurangi kendala yang selama ini menjadi permasalahan adalah dengan memberi bimbingan teknis berbagai perangkat penyusunan dan validasi KLHS. Dari hasil pelatihan diketahui bahwa setelah mengikuti materi, pemahaman dan penguasaan kelompok kerja kabupaten/kota dan tenaga ahli dari universitas dapat meningkat dibandingkan sebelum seri pendampingan

Abstract

The sustainable development goals (SDGs) are agreed-upon common goals that must be met by all nations by 2030. Efforts to meet the SDG targets are a national development priority that necessitates the coordination of planning policies at the national and regional levels. In Central Kalimantan, the provincial and district/city governments are currently preparing various Strategic Environmental Assessment documents (SEA). The goal of this activity is to increase the working group's and experts' understanding of the principles of sustainable development that have become the basis and integrated into the development of a region, so that they can provide recommendations for environmental considerations at the strategic decision-making level, particularly after the 2024 joint national and provincial election. It has been carried out to reduce the obstacles that have previously been a problem by providing technical guidance on various tools for preparing and validating SEA. Following the training, it was discovered that the understanding and mastery of district/city working groups and university experts could improve compared to before the assistance series.



© 2024 Nina Yulianti, Fengky Florante Adji, Alexandra Hukom, Nomeritae, Hendrik Segah, Muhammad Taswin Munier, Paulus Tembalang, Ravenalla Al Hakim Sampurna Putra S. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](#). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7252>

How to cite: Yulianti, N., Adji, F., Hukom, A., Nomeritae., Segah, H., Munier, M, T., Tembalang., & Putra S, R, A, H, S. (2024). Pendampingan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Dasar dalam Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(9), 1536-1554. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7252>

PENDAHULUAN

Alasan penting dari praktik perencanaan saat ini adalah pembangunan berkelanjutan. Namun, berdasarkan pemahaman saat ini, perencanaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan tampaknya tidak sesuai dengan paradigma komunikatif, karena hal ini biasanya digambarkan terdiri dari proses terstruktur dengan penetapan tujuan, identifikasi alternatif, penilaian, pengambilan keputusan, partisipasi, dan tahapan pemantauan (FISCHER, 2002; Kelly *et al.*, 2013). Prinsip dasar keberlanjutan adalah pengintegrasian kesadaran lingkungan, sosial dan ekonomi ke dalam proses pengambilan keputusan yang efektif, partisipasi masyarakat, tindakan pencegahan/penanggulangan terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki, keseimbangan penggunaan sumber daya antara generasi sekarang dan mendatang, dan keamanan lingkungan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memelihara proses dan sistem lingkungan yang penting (Hameed, 2019).

Dalam upaya meminimalisir dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berdasarkan undang-undang ini pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup (KLHS). Implementasi undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS dan Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Melalui kajian ini, pemerintah ingin memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dijadikan dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) dalam setiap perencanaan, baik rencana pembangunan maupun rencana tata ruang. Dalam pedoman KLHS terdapat berbagai langkah dan variabel analisis yang diharapkan dapat digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari setiap kebijakan, rencana dan program. Dengan demikian diharapkan dapat memprediksi dampak apa yang mungkin terjadi jika suatu rencana dilaksanakan.

Di Indonesia diperlukan lebih banyak upaya untuk mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pertimbangan ini memperhatikan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (Umam, 2021). Indonesia memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota (Badan Pusat Statistik, 2020). Diperlukan lebih dari 1.600 KLHS setidaknya untuk pembangunan dan perencanaan tata ruang. Angka ini belum mencakup kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) lain yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, sehingga ribuan KLHS harus disiapkan.

Kajian multidisiplin yang mencakup ilmu alam dan ilmu sosial berdasarkan paradigma *System Thinking* (Perdicoúlis, 2016) dan *Dynamic System* (Kuai *et al.*, 2014), diperlukan untuk menghasilkan KLHS yang memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengambil pendekatan sistemik-holistik untuk masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Secara metodologis, harus ada baseline atau proyeksi kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi ke depan dalam dokumen KLHS, serta mengukur kemunculan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi KRP dalam KLHS. Penyusun tidak akan mengetahui apakah KRP yang dimaksud berkelanjutan atau tidak kecuali mereka mengetahui keberlanjutan dari setiap aspek, yaitu keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Melihat begitu pentingnya dokumen KLHS seperti yang disampaikan (Brontowijono *et al.*, 2012), diperlukan kesamaan persepsi dan juga pemahaman terhadap isu dari para pelaku utama yang terlibat dalam proses KLHS. Pada kelompok kerja (pokja) di provinsi, kabupaten dan kota terdapat 4 (empat) komponen yaitu tim pengarah (kepala daerah), tim Pembina (kepala-kepala SOPD), tim penyusun dari pemerintah (tim teknis SOPD), serta tim penyusun unsur dari perguruan tinggi dan tenaga ahli profesional. Kegiatan Pengabdian Masyarakat (AbdiMas) ini bertujuan untuk memberi pendampingan khusus kepada tim penyusun dari kedua kelompok untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip dasar dan metode pengelolaan lingkungan hidup strategis sesuai karakter dan kepentingan objek kajian. Setelah pendampingan ini diharapkan peserta bisa menyusun dokumen KLHS serta dapat merencanakan dan mengevaluasi

suatu program atau kebijakan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya terbangunnya jejaring komunikasi antar tenaga ahli penyusun KLHS/pendamping dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten di Kalimantan Tengah untuk memastikan terbangunnya sinergi dan standarisasi kualitas pelaksanaan KLHS.

METODE

Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebanyak 2 (dua) kali. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan di Ruang Aula Rahan Universitas Palangka Raya, dan Aula Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. Pendampingan pertama pada tanggal 26 s.d 29 Juli 2022 untuk tenaga ahli perguruan tinggi dan Lembaga independent, sedangkan pendampingan kedua pada tanggal 14 s.d 17 Februari 2023 untuk tim pemerintah kabupaten dan kota se Kalimantan Tengah.

Metode pendampingan dilakukan dengan menerapkan konsep blended learning, yang menggabungkan pembelajaran daring ("dalam jaringan") dan luring ("luar jaringan"), seperti yang tercantum pada Tabel 1. Nugraha *et al.*, (2020) menyebutkan bahwa pembelajaran daring juga memiliki kelebihan seperti dapat meminimalisir waktu dan tenaga. Sedangkan pembelajaran luring menghadirkan adanya interaksi nyata and umpan balik langsung antara pemberi materi dan peserta (Widyasari, 2022).

Tabel I. Materi pendampingan dan metode pembelajaran

Hari	Materi I	Metode Pembelajaran	Materi II	Metode Pembelajaran
1	<ul style="list-style-type: none"> Proses dan Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD Berdasarkan Permen 7/2018 dan Arahan Terkait Kebutuhan TA KLHS Menjelang Pemilukada 2024 Berpikir Strategis dan Berpikir Sistem dalam Memahami Konsep dan Konteks Pembangunan Berkelanjutan Konsep Dasar KLHS dan Penerapannya dalam Perencanaan Pembangunan 	Daring	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran jadwal, tahapan dan substansi penyusunan RPJMD dan RPJPD Kompetensi penyusun KLHS berdasarkan PP No. 46 Tahun 2016 dan Permen LHK No. 69 Tahun 2017 Link and Match Kebutuhan KLHS RPJMD (2025-2030) dan RPJPD 2025-2045 	Daring
		Luring		Daring
		Luring		Luring
2	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan Isu PB Strategis dan Paling Strategis Berdasarkan Capaian Indikator TPB (RPJMD) dan Pengerucutan Isu TPB (non RPJMD) Penyusunan Skenario PB - Perumusan Alternatif, Rekomendasi Perbaikan KRP Integrasi Hasil KLHS ke dalam KRP Persiapan Penyusunan KLHS (Pembentukan Tim, Pembuatan KAK, Alokasi 	Luring	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) dan Menengah (RPJMD) KLHS dan Penerapannya dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Analisis Capaian indikator TPB Analisis 6 Muatan untuk KRP RPJMD dan Kebijakan RPJPD 	Luring
		Luring		Luring
		Luring		Luring
		Daring		Daring

Anggaran dan Agenda Kegiatan)				
3	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Ekosistem Pesisir Laut (Metode dan Pendekatan Matek Zonasi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil - WP3K RTRW) 	Daring	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan isu strategis TPB dan hasil analisis capaian indicator TPB berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) 	Luring
	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Informasi Geospasial Dalam Penentuan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Kajian Enam Muatan Dalam Klhs 	Daring	<ul style="list-style-type: none"> • Target Penurunan Emisi GRK dalam mendukung Pencapaian NDC di Kalteng dan Integrasinya ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan 	Luring
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Kompetensi Penyusun KLHS, Prosedur Penyusunan dan Struktur Laporan Pasca Peraturan Perundangan Terbaru 	Daring	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi perbaikan KRP • Integrasi KLHS ke RPJMD dan RPJPD dan Penilaian Mandiri KLHS untuk pengambilan keputusan KRP 	Luring Luring
	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Pengaruh KRP (Kebijakan Rencana Program) dan 6 Muatan KLHS dalam KLHS Perencanaan Tata Ruang 	Luring		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Simulasi Penyusunan KLHS RTRW Integrasi Pasca Permen ATR No 11/2021 (dilanjutkan dengan <i>Take home assignment</i>) 	Luring	<ul style="list-style-type: none"> • FOLU Net Sink 2030 dalam dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD 	Daring
			<ul style="list-style-type: none"> • FOLU Net Sink 2030 dalam dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD 	Daring

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Rahan Universitas Palangka Raya pada hari Selasa sampai dengan jumat, 26 - 29 Juli 2022. Kegiatan pendampingan diikuti oleh 35 orang calon tenaga ahli (hadir secara luring) dan 30 observer (hadir secara daring) dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Palangka Raya dan juga Universitas Kristen Palangka Raya serta Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Selanjutnya kegiatan dilaksanakan di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah (14-17 Pebruari 2023), dengan diikuti oleh 32 orang tim kelompok kerja pemerintah Kabupaten dan Kota (hadir secara luring) dan 25 orang calon tenaga ahli universitas (hadir secara daring). Ketua tim dan didampingi oleh anggota tim pengabdian lainnya sebagai fasilitator pada kegiatan ini. Narasumber pendampingan yang berasal dari Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Narasumber dari universitas adalah Universitas Palangka Raya, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada. Sedangkan narasumber independent berasal dari KLHS Center dan Praktisi Spasial Kalimantan Tengah.

Dalam proses kegiatan setiap peserta diwajibkan untuk membawa laptop untuk lancarnya kegiatan pendampingan pembuatan alat evaluasi hasil belajar dengan sistem Hybrid Learning. Setiap peserta dapat mengoperasikan komputer dengan baik, dan memiliki jaringan internet agar pendampingan penyusunan dokumen KLHS baik RTRW, RPJMD dan RPJP dapat berjalan lancar. Beberapa perangkat lunak wajib dipasang pada laptop peserta seperti QGIS, VSIM dan lainnya. Adapun agenda kegiatan pendampingan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar dalam Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah terbagi menjadi 4 (empat) kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pre-test

Secara sederhana, pengertian pre test adalah tes yang dilakukan sebelum pemateri memulai pembelajaran, untuk mengetahui kemampuan awal peserta pelatihan terkait materi yang akan disampaikan. Soal pre test umumnya mengacu pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan dapat berbentuk pilihan ganda, isian singkat, atau uraian.

2. Penyampaian materi pendampingan

Pada kegiatan pendampingan ini narasumber memberikan materi kepada peserta dengan menggunakan 3 (tiga) metode yaitu metode ceramah, metode diskusi dan metode studi kasus. Pemateri menggunakan metode pengajaran ceramah untuk membuat peserta pendampingan memahami konsep pembelajaran dan mempersiapkan mereka untuk dunia nyata (Gambar 1a). Kemudian pemateri mengkombinasikan ceramah dan diskusi. Jenis pengajaran ini mendorong siswa berpartisipasi. Instruktur menyajikan ceramah, tetapi dia sering berhenti mengajukan pertanyaan kepada peserta atau meminta peserta membaca materi yang telah mereka siapkan. Arah interaksi dapat terjadi dalam salah satu dari tiga cara: (1) pengajar ke kelas (semua peserta), (2) pengajar ke siswa perorangan, atau (3) siswa perorangan ke pengajar. Studi kasus adalah cerita yang digunakan sebagai alat pengajaran untuk menunjukkan penerapan teori atau konsep pada situasi nyata. Bergantung pada tujuan yang ingin mereka penuhi, kasus dapat didorong oleh fakta dan deduktif di mana ada jawaban yang benar, atau dapat didorong oleh konteks di mana beberapa solusi dimungkinkan (Gambar 1b).



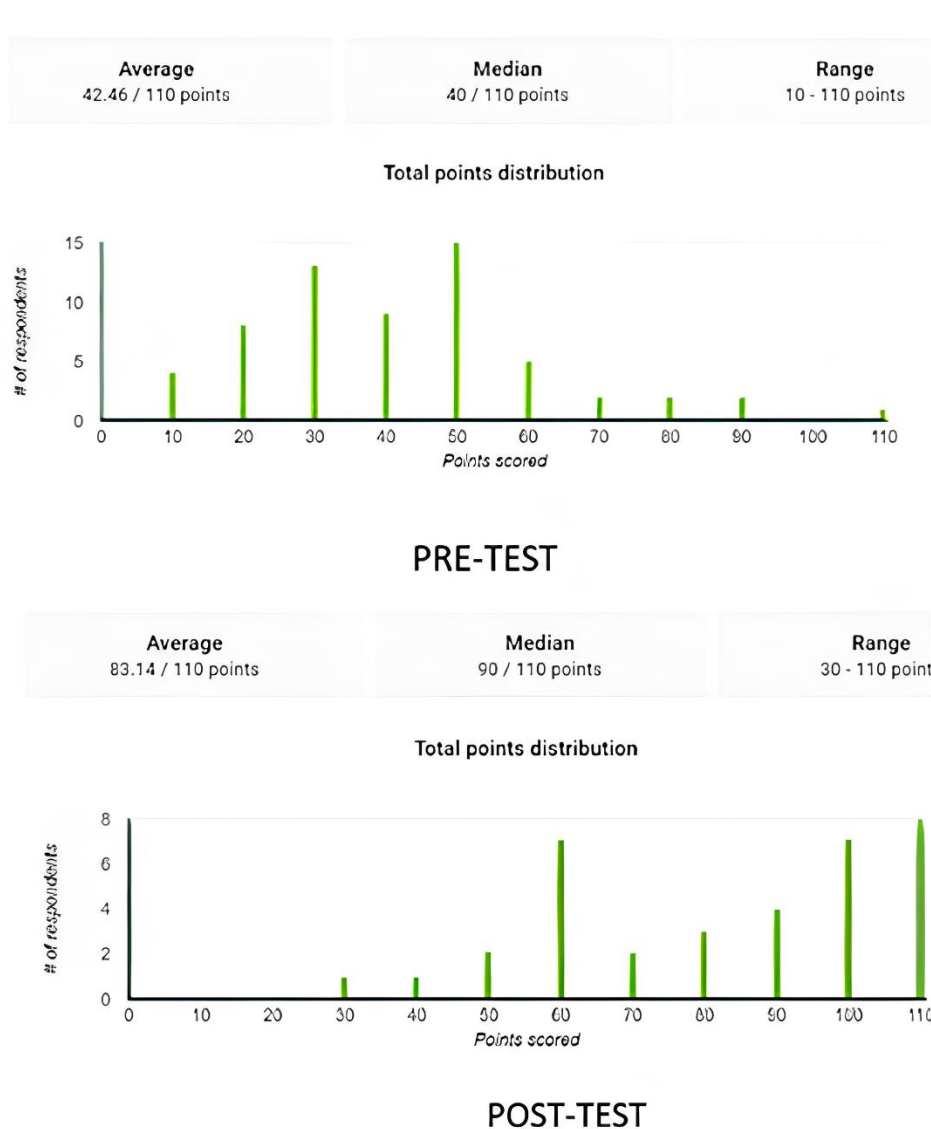
Gambar 1. Proses Pendampingan Penyusunan KLHS (a) ceramah (b) case study (c) dinamika kelompok

3. Dinamika kelompok

Kerja berpasangan/kelompok merupakan bagian integral dari pembelajaran bahasa karena tidak hanya memberikan kesempatan unik bagi peserta untuk meningkatkan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah, tetapi juga memungkinkan mereka mengalami keragaman kepribadian dan perspektif (Gambar 1c). Pada awal kegiatan, peserta harus merasa nyaman dan santai dalam berbagi informasi pribadi satu sama lain. Selama kegiatan, peserta berpartisipasi dalam kegiatan di mana mereka berbagi rasa kegembiraan dengan mengungkapkan kisah hidup mereka, berkolaborasi untuk memecahkan masalah, dan bersaing dalam permainan, yang membantu mengembangkan perasaan pengertian, rasa memiliki, dan kepercayaan. Di akhir kegiatan, peserta mendapat waktu untuk merenungkan kenangan terbaik mereka tentang pengalaman belajar bersama teman.

4. Post-test

Kompetensi akhir merupakan tingkat penguasaan materi peserta didik setelah menerima pembelajaran bisa diukur dengan post test. Seperti halnya pre test, soal post test dapat berbentuk pilihan ganda dan uraian. Soal yang diberikan pemateri bisa juga sama dengan soal pre test. Biasanya, nilai post test akan meningkat jika peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebaliknya, apabila peserta didik tidak mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik, nilai post test nya tidak jauh beda dengan sebelumnya (Gambar 2).



Gambar 2. Hasil test kemampuan dasar (%) peserta pendampingan penyusunan KLHS yang diuji pada awal dan akhir kegiatan pendampingan

PEMBAHASAN

Hasil dari pelatihan tim Universitas Palangka Raya melalui dukungan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis di Kalimantan Tengah merupakan langkah nyata dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Sejak tahun 2022, upaya ini telah berhasil menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan seperti yang dijelaskan dalam penelitian Yahman & Setyagama, (2023). Melalui pendampingan ini, pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, aktif terlibat dalam proses penyusunan studi lingkungan hidup, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diusulkan berkelanjutan secara ekologis dan sosial.

Menurut Zhang *et al.* (2016), pentingnya kebijakan, informasi, dan keberlanjutan semakin menonjol dalam era big data dan Open Government, memperkuat urgensi dari pendekatan yang diterapkan oleh Universitas Palangka Raya. Kegiatan ini bukan hanya sekadar membuat studi lingkungan strategis, tetapi juga menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif

dan akurat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat lokal (Balane *et al.*, 2020). Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan aspek lingkungan, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal secara holistik.

Pemerintah dan masyarakat juga perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap penerapan teknologi berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan lingkungan (Kusuma, 2014). Dengan demikian, hasil dari pendampingan ini akan memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, dengan penelitian lingkungan strategis yang tidak hanya komprehensif dan beralasan, tetapi juga memberikan panduan yang jelas bagi pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan (Brown & Green, 2021). Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kajian lingkungan hidup strategis ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030, tetapi juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. SDGs menggarisbawahi pentingnya integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap langkah pembangunan untuk memastikan keberlanjutan planet ini bagi generasi mendatang (UN SDSN, 2015). Dengan mempertimbangkan hasil dari kajian ini, Indonesia dapat memperkuat komitmennya terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut, termasuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Presiden Republik Indonesia, 2023). Kajian lingkungan hidup strategis tidak hanya memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak akan merusak ekosistem alam yang kaya dan beragam di Kalimantan Tengah. Dengan membangun pemahaman yang kokoh tentang dampak lingkungan dari setiap kebijakan pembangunan, Indonesia dapat menavigasi menuju masa depan yang sejahtera tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari program pendampingan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut:

1. Program pendampingan berhasil menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk dua kelompok, yaitu tenaga ahli penyusun KLHS dari pemerintah dan universitas. Untuk meningkatkan keterlibatan peserta dalam pelatihan dan bimbingan teknis, berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya menggunakan ceramah dan diskusi untuk memperoleh masukan dari peserta dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam proses pembelajaran serta melakukan simulasi dan role-playing untuk memungkinkan peserta berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran secara berkelompok.
2. Pada pendampingan ini diberikan tes atau tugas kepada peserta sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengetahui apakah mereka menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan. Tes dan tugas ini dapat berupa soal, latihan, atau proyek yang relevan dengan materi pelatihan. Meskipun belum semua peserta pendampingan menguasai materi dengan baik, program berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Peningkatan kapasitas kemampuan dasar rata-rata peserta meningkat lebih dari 50% dibandingkan sebelum kegiatan ini dilaksanakan.
3. Secara keseluruhan, program pendampingan ini berhasil meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam penyusunan KLHS serta implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, meskipun terdapat tantangan dalam pemahaman materi oleh sebagian peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Global Green Growth Institute atas dukungan keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini, serta kepada Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah atas arahnya kepada peserta dari kota dan kabupaten di Kalimantan Tengah selama kegiatan berlangsung. Publikasi artikel ini didukung oleh seluruh anggota Satuan Tugas SDGs Center Universitas Palangka Raya.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). Catalog: 1101001. Statistik Indonesia 2020, 1101001, 790. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Balane MA, Palafox B, Palileo-Villanueva LM, McKee M, Balabanova D. (2020). Enhancing the use of stakeholder analysis for policy implementation research: towards a novel framing and operationalised measures. *BMJ Glob Health*. Nov;5(11):e002661. PMID: 33158851; PMCID: PMC7651378. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002661>
- Brontowijono, W., L., R., & W., D. (2012). KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 4(1), 43–54. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol4.iss1.art5>
- Fischer, T. B. (2002). Strategic environmental assessment performance criteria – the same requirements for every assessment? *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 4(1), 83–99. <http://www.jstor.org/stable/enviassepolimana.4.1.83>
- Brown, T. J., & Green, S. K. (2021). Leadership skills for managing change and transformation in educational institutions. *Journal of Educational Administration*, 59(2), 132-147. <http://dx.doi.org/10.32479/irmm.13526>
- Hameed, A. A. (2019). Smart city planning and sustainable development. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 518(2), 22042. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/518/2/022042>
- Kelly, R. A., Jakeman, A. J., Barreteau, O., Borsuk, M. E., ElSawah, S., Hamilton, S. H., Henriksen, H. J., Kuikka, S., Maier, H. R., Rizzoli, A. E., van Delden, H., & Voinov, A. A. (2013). Selecting among five common modelling approaches for integrated environmental assessment and management. *Environmental Modelling and Software*, 47, 159–181. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2013.05.005>
- Kuai, P., Li, W., Cheng, G., & Ren, G.-P. (2014). An application of system dynamics model into strategic environmental assessment of urban planning: a case study of Linfen city. *Zhongguo Huanjing Kexue/China Environmental Science*, 34, 1347–1354.
- Kusuma,, B.M.A. (2014). The Role of Government in Overcoming Industrial Development Impact towards Environmental Sustainability. *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, 5(1)
- Nugraha, S. A., Sudiatmi, T., & Suswandari, M. (2020). Studi Pengaruh Daring Learning Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas IV. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 265–276. <https://doi.org/10.47492/jjp.v1i3.74>
- Perdicoulis, A. (2016). Systems thinking and SEA. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 34(2), 176–179. <https://doi.org/10.1080/14615517.2016.1152731>
- Umam, A. H. (2021). Rapid assessment of climate change issues in Indonesia strategic environmental assessment (SEA)-KLHS. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 644(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/644/1/012045>
- UN SDSN. 2015. Data for development. A needs assessment for SDG monitoring and statistical capacity development. Technical Report. UNSDSN.

- Widyasari, N. F. (2022). Strategi Pelaksanaan Tatap Muka (Pembelajaran Luring) Pasca Pandemi Covid-19. *Journal of Instructional and Development Researches*, **2**(4), 153–161. <https://doi.org/10.53621/jider.v2i4.98>
- Yahman, Y., Setyagama, A. (2023). Government policy in regulating the environment for development of sustainable environment in Indonesia. *Environ Dev Sustain* **25**, 12829–12840 <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02591-1>
- Zhang, J., Luna-Reyes, L.F., Pardo, T.A. (2016). Information, Policy, and Sustainability: The Role of Information Technology in the Age of Big Data and Open Government. In: Zhang, J., Luna-Reyes, L., Pardo, T., Sayogo, D. (eds) Information, Models, and Sustainability. *Public Administration and Information Technology*, vol **20**. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25439-5_1